

KECEMBURUAN PEMBANGUNAN IBUKOTA NEGARA DI KALIMANTAN

Budi Suryadi¹, Tomi Oktavianor²

¹Universitas Lambung Mangkurat/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
budisuryadi@ulm.ac.id

²Universitas Lambung Mangkurat/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
tomi.oktavianor@ulm.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan ibukota negara di Kalimantan menimbulkan reaksi yang beragam dari ranah akademisi dan politisi. Tujuan penelitian memahami wacana kecemburuan pembangunan ibukota negara di Kalimantan. Metode penelitian menggunakan analisis wacana dengan model analisis data frame. Hasil penelitian menunjukkan adanya kecemburuan pembangunan ibukota negara baru di Kalimantan yang berkarakter semi totalitarian kelembagaan. Kecemburuan pembangunan dalam wacana penolakan pemindahan ibukota negara lebih bernuansa ketidakterediaan fasilitas sosial, anggaran pembiayaan yang besar dan lokasi yang sangat jauh. Kesimpulan kecenderungan kecemburuan pembangunan ibukota negara baru di Kalimantan bercirikan semi totalitarian kelembagaan dalam wacana penolakan pemindahan ibukota negara di Kalimantan. Perlunya pendidikan untuk mengurangi semi totalitarian kelembagaan dalam rangka memperkuat negara demokrasi.

Kata kunci: *Kecemburuan Pembangunan, Ibukota Negara, demokrasi, semi totalitarian*

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2010 presiden Yudhoyono membuka wacana tentang pemindahan ibukota negara, yang kemudian pada tahun 2017 presiden Jokowi mengangkat kembali wacana pentingnya pemindahan ibukota negara ke tempat lain, yang salah satu pilihan Palangkaraya, dengan 4 pertimbangan, yaitu 1) Jakarta sudah terlalu padat dan tidak sesuai lagi untuk ibukota negara; 2) Palangkaraya terdapat di Kalimantan, pulau tanpa gunung berapi sehingga bebas gempa; 3) posisinya di luar Jawa sehingga menetralsir pembangunan yang Jawa-sentris; 4) tidak memerlukan dana APBN (www.merdeka.com).

Pada saat itu, wacana respon terbagi menjadi 3 kategori yang mengikuti pendapat para pemuka masyarakat yang berasal dari kalangan cerdas pandai (intelektual, akademik, praktisi senior), yang terkategori dalam wacana respon mendukung, menolak dan kombinasi (Bappenas, 2018). Wacana mendukung dengan argumentasi Jakarta tidak memadai lagi, untuk strategi masa akan datang, penataan ulang maksimalisasi otonomi daerah dan membuka ruang ekonomi baru. Wacana menolak dengan argumentasi memperbaiki Jakarta hanya memerlukan biaya yang kecil, transportasi massal sudah lebih baik, memerlukan permasalahan konstitusional yang tidak mudah. Wacana kombinasi dengan argumentasi pemerintahan dipindahkan tetapi tidak membangun kota baru.

Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada 16 Agustus 2019 dan disusul dengan pengumuman pemindahan Ibukota Negara oleh Presiden pada tanggal 25 Agustus 2019 di Istana Negara.

Kemudian pada perkembangannya wacana pemindahan ibukota negara, menimbulkan studi kajian yang disampaikan akademisi tentang pandangan pemindahan ibukota negara, sebagai berikut, yaitu: Armayani (2020); Taufik (2020) yang cenderung pada aspek dampak ekonomi, Hadi dan Ristawati (2020) tinjauan aspek konstitusi, Mahmud (2020) tinjauan perubahan politik dan perubahan sosial.

Pada konteks pembangunan yang berkaitan dengan individu menunjukkan kecenderungan individu dengan sensitivitas penolakan tinggi untuk mengalami tingkat kecemburuan yang lebih tinggi, dan kemudian memiliki kecenderungan agresi yang lebih besar, daripada individu dengan sensitivitas penolakan rendah (Murphy & Russell, 2018).

Pada penelitian tematik menunjukkan adanya hubungan antara media sosial dan kecemburuan yang dilandasi atas fenomena, berdasarkan (1) perbedaan sosiodemografi dalam pengalaman, (2) anteseden individu, mitra, saingan dan keterjangkauan, (3) konsekuensi positif dan negatif (Tandon et al., 2021).

Kerangka kerja Goffman tentang (semi) -totalitarian institution, menunjukkan secara heuristik bahwa pengalaman kecemburuan mengalami perkembangan dan konsekuensi, yang mempengaruhi bentuk pengalaman iri hati dan kecemburuan dari perspektif penduduk (Koren & Ayalon, 2022).

2. METODE

Varian metode kualitatif menggunakan analisis wacana yang menurut Stubbs (1983) merupakan suatu kajian yang meneliti dan menganalisis Bahasa yang digunakan secara ilmiah, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Penggunaan Bahasa secara alamiah, seperti dalam komunikasi sehari-hari. Analisis data menggunakan teknik analisis *frame* yang menurut Bungin (2021) merupakan suatu teknik analisis data dengan melihat dan menemukan *frame* atau media *package*, suatu perspektif untuk melihat sebuah perspektif yang digunakan untuk melakukan pengamatan, analisis dan interpretasi terhadap sebuah realitas sosial di masyarakat.

3. TEMUAN STUDI DAN DISKUSI

3.1. Ketidaktersediaan Fasilitas Sosial

Ketidaktersediaan fasilitas sosial menjadi perdebatan wacana dimana ada wacana wilayah yang akan menjadi ibukota negara sudah memiliki ketersediaan fasilitas sosial, seperti supermarket, mall, sekolah, rumah makan, tempat rekreasi. Fasilitas sosial ini diperlukan bagi pegawai dan keluarganya yang akan pindah ke sana.

Asumsinya pegawai-pegawai pemerintah pusat yang pindah akan membawa serta seluruh keluarganya yang terdiri dari istri dan anaknya atau jika istrinya yang jadi pegawai maka akan membawa suami dan anaknya. Para keluarga pegawai ini akan memerlukan fasilitas sosial untuk memenuhi keperluan rumah tangga dan keperluan anak-anak mereka.

Ketidaktersediaan fasilitas sosial menjadi argumentasi wacana dalam penolakan pemindahan ibukota negara di Kalimantan walaupun disadari realitas di lapangan belum maksimalnya pemerataan pembangunan di seluruh pelosok wilayah Negara Indonesia. Adanya

kecemburuan pembangunan dalam pemindahan ibukota negara yang akan menciptakan pembangunan fasilitas sosial di tempat lainnya.

3.2. Anggaran Pembiayaan yang Besar

Anggaran pembiayaan pemindahan ibukota negara menjadi perdebatan wacana terutama perihal anggaran pembiayaan yang diketahui akan memerlukan anggaran biaya besar untuk membangun infrastruktur jalan, jembatan, perkantoran dan perumahan di wilayah baru dalam rangka menopang kehadiran ibukota negara tersebut.

Wacana pemindahan ibukota negara di wilayah Kalimantan memerlukan anggaran pembiayaan yang besar dibandingkan pemindahan ibukota negara itu berada di sekitar wilayah Jakarta, seperti Bogor. Logikanya jika di wilayah sekitar Jakarta hanya diperlukan pembangunan infrastruktur perkantoran pemerintahan dimana infrastruktur lainnya sudah tersedia.

Pemindahan ibukota negara di wilayah Kalimantan Timur yang tepatnya di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser utara memerlukan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya perkantoran pemerintahan namun juga infrastruktur jalan, jembatan, perumahan, lapangan udara untuk kemudahan akses ke wilayah baru tersebut.

Anggaran pembiayaan yang besar menjadi argumentasi wacana dalam penolakan ibukota negara di Kalimantan walaupun disadari realitasnya pembangunan kota memang memerlukan biaya besar, apalagi selevel pembangunan ibukota negara akan memerlukan anggaran biaya yang besar. Adanya kecemburuan pembangunan dalam pemindahan ibukota negara memerlukan anggaran biaya besar untuk pembangunan di wilayah lainnya.

3.3. Lokasi yang Sangat Jauh

Lokasi yang sangat jauh ibukota negara menjadi perdebatan wacana yang belum selesai sampai sekarang walaupun realitasnya sudah ditetapkan resmi ibukota negara di wilayah Kalimantan Timur berdasarkan kebijakan pemerintah dalam bentuk Undang-Undang No 3 tahun 2022 tentang Ibukota Negara.

Penetapan status resmi ini masih menimbulkan perdebatan wacana yang menimbulkan kontroversi dimana wacana yang bernuansa lokasi yang sangat jauh tersebut dianggap sebagai tempat buangan hantu. Wacana ini diargumentasikan dengan cara menglapisi wacana lokal sehingga berbeda pemahaman dan konteks sosialnya.

Ketika wacana tempat buangan hantu dilekatkan pada lokasi pemindahan ibukota menjadi tidak relevan dengan konteks sosialnya, dimana konteks sosial yang sekarang dalam pemindahan ibukota negara untuk mengatasi permasalahan jangka panjang dalam pembangunan negara jadi bukan konteks mengatasi kehidupan sosial masyarakat.

Lokasi yang sangat jauh menjadi argumentasi wacana dalam penolakan ibukota negara di Kalimantan yang walaupun disadari realitasnya pembangunan ibukota negara memerlukan ketersediaan lahan kosong yang sangat luas untuk integrasi perkantoran pemerintahan. Adanya kecemburuan pembangunan dalam pemindahan ibukota negara yang memerlukan lahan kosong yang luas di tempat lain.

4. KESIMPULAN

Kecenderungan kecemburuan pembangunan ibukota negara di Kalimantan bercirikan semi totalitarian kelembagaan dalam wacana penolakan pemindahan ibukota negara di Kalimantan.

REFERENSI

- Armayani, RR. 2020. *Dampak dan Resiko Perpindahan Ibukota Terhadap Ekonomi di Indonesia*. (At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam (V) : 183-203).
- Bungin. 2021. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Hadi, F., dan Ristawati, R. 2020. *Pemindahan Ibukota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi*. (Jurnal Konstitusi (17) 3: 530-557).
- Koren, C. dan Ayalon, L. 2022. *Envy and Jealousy of Living apart Together Relationships in Continuing Care Retirement Communities: Perspectives of Staff and Residents*. (British Journal of Social Work (52)1).
- Mahmud, A. M. 2020. *Aspek Politik dan Sosial Pemindahan Ibukota Negara Ke Kalimantan Timur*. (Journal Justice (2) 2: 1-18).
- Murphy, A. M., dan Russell, G. 2018. *Rejection Sensitivity, Jealousy, and the Relationship to Interpersonal Aggression*. (Journal of Interpersonal Violence (33)13).
- Stubbs, M. 1996. *Discourse Analysis: The Sociolinguistic Analysis of Natural Language*. Oxford; Basil Blackwell Publishers Ltd.
- Tandon, A. Dhir, dan Mäntymäki, M. 2021. *Jealousy due to social media? A systematic literature review and framework of social media-induced jealousy*. (In Internet Research (31) 5).
- Taufiq, M. 2020. *Pemindahan Ibukota dan Potensi Konektivitas Pemerataan Ekonomi*. (Jurnal Vokasi Indonesia (8) 1: 27-39).